

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi terdiri dari dua kata yaitu pembangunan dan ekonomi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembangunan adalah hasil pekerjaan membangun, sedangkan ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan pengolahan barang industri, pertanian dan perdagangannya (Badudu, 2001).

Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1996 dalam Saerofi, 2005). Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat berlangsung untuk jangka panjang.

Pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berlangsung pada setiap daerah di wilayah Indonesia harus disesuaikan dengan potensi dan prioritas yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga keseluruhan pembangunan

merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional (Choirullah, 2007).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan hakikat dari proses dan sifat pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk.

Secara umum permasalahan pokok pembangunan di Indonesia dalam konteks penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 adalah (Yuliadi, 2009):

- a) Tingginya jumlah pengangguran dan penduduk miskin.
- b) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).
- c) Kesenjangan pembangunan antar kelompok, wilayah dan daerah di Indonesia.
- d) Menurut kualitas sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.
- e) Rendahnya penegakkan hukum dan keadilan.
- f) Tingginya angka kejahatan dan masih adanya potensi konflik horisontal.

g) Ancaman separatisme dan rendahnya kemampuan Hankam

h) Kelembagaan demokrasi yang masih lemah.

Untuk mengamati dan menganalisis permasalahan pembangunan dan bagaimana kebijakan yang diambil, maka pembahasan dilakukan menurut kelompok dan bidang-bidang pembangunan.

Indonesia sebagai negara yang kaya dengan SDA namun memiliki keterbatasan dalam kualitas SDM perlu merumuskan strategi kebijakan untuk dapat mewujudkan tiga tujuan pembangunan nasional (*triple bottom line*) secara simultan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat secara adil, dan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan SDA. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mencakup (Yuliadi, 2009):

- a. Peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang kompetitif.
- b. Implementasi tata ruang wilayah secara konsisten untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- c. Program diversifikasi pangan nasional melalui pengembangan pangan non beras untuk meningkatkan alternatif pangan rakyat menuju swasembada

- d. Pengembangan industri manufaktur yang mengandung nilai tambah (*value added*) yang tinggi sekaligus dapat menyerap tenaga kerja serta mendorong kegiatan ekonomi terkait.
- e. Pengembangan industri pendukung untuk memperkuat struktur industri nasional yang kokoh dan stabil bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi terkait.
- f. Peningkatan kualitas SDM melalui penguasaan dan penerapan Iptek dalam kegiatan bisnis dan ekonomi.
- g. Adanya dukungan politik (*political will*) dari semua unsur pemerintah yang terkait untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan kegiatan ekonomi.

Meningkatkan etos kerja baik pada pengusaha maupun pekerja untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif serta secara simultan mencegah dan memerangi setiap praktek yang dapat merusak sistem ekonomi seperti KKN, *illegal logging*, dan sebagainya

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non-ekonomi. Oleh sebab itu, sasaran pembangunan yang minimal dan pasti ada menurut Todaro (1983) dalam Suryana (2000) adalah:

- a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti perumahan

- b. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang senata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
- c. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Ada empat model pembangunan yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (Suryana, 2000). Berdasar atas model pembangunan tersebut, semua itu bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal.

2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan besarnya output nasional

dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1999 dalam Saerofi, 2005). Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2002), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.

Sedangkan menurut Simon Kuznet dalam Jhingan (2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Kinerja perekonomian Indonesia dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh laju pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang selama periode 1969-1981 mencapai tingkat rata-rata 7,7% setahun. Tetapi mulai tahun 1982 pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun menjadi rata-rata 4,0% per tahun (Saerofi, 2005).

Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu ($PDRB_t$) dengan PDRB sebelumnya ($PDRB_{t-1}$).

$$\text{Laju pertumbuhan ekonomi } (\Delta Y) = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Ahli-ahli ekonomi telah lama memandang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (Sukirno, 1996 dalam Saerofi, 2005):

a. Tanah dan kekayaan alam lain

Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara dimana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer yaitu sektor dimana kekayaan alam terdapat kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di satu pihak, dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis barang kegiatan ekonomi di lain pihak, sehingga membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi.

Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat kemungkinannya

c. Barang-barang modal dan tingkat ekonomi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal yang telah bertambah jumlahnya dan teknologi yang bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi.

Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan maka kemajuan yang akan dicapai akan jauh lebih rendah.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sikap masyarakat dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar pada pertumbuhan ekonomi, diantaranya sikap hemat untuk mengumpulkan lebih besar uang untuk investasi, sikap kerja keras dan kegiatan-kegiatan mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu menambah pendapatan dan keuntungan. Disisi lain sikap masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara-cara produksi yang modern dan produktivitasnya tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat.

e. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

Apabila luas pasar terbatas, tidak ada dorongan kepada para

untuk mengadopsi teknologi modern yang tingkat

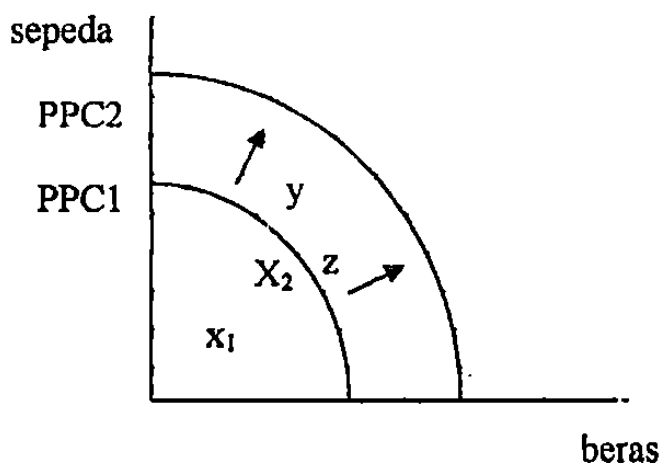
produktivitasnya tinggi. Karena produktivitasnya rendah maka pendapatan para pekerja tetap rendah, dan ini selanjutnya membatasi pasar.

Menurut teori *Neo-Klasik Solow* (tentang pertumbuhan ekonomi), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menyangkut beberapa aspek, yaitu (Spence, 2008):

- a. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan difasilitasi oleh pemanfaatan dari kaitan (*link*) dengan ekonomi global, yang dapat dijelaskan oleh kajian kurva/Frontir Kemungkinan Produksi (PPC).
- b. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dipengaruhi oleh perkembangan demografi yang menyangkut antara lain aspek struktur umur penduduk.
- c. Pertumbuhan ekonomi selain harus *sustained* dan *high*, juga harus *inclusive*.
- d. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan waktu beberapa dasawarsa dan pertumbuhan ekonomi bukan merupakan tujuan akhir tetapi hanya merupakan suatu sarana untuk mencapai berbagai sasaran lain seperti penciptaan kesempatan untuk dapat bekerja dan agar masyarakatnya menjadi kreatif.

Menurut Spence (2008), konsep *Production Possibility Curve* (PPC) digunakan untuk memudahkan pemahaman tentang manfaat yang akan diperoleh bagi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara apabila membuka diri pada perekonomian global. PPC adalah geometri yang

menunjukkan konversi sumber daya ekonomi ke jumlah dua jenis pilihan ekonomi (baik barang atau jasa) yang dapat dijangkau (Nasrudin, 2009). PPC dikenal juga dengan istilah *Production Possibility Frontier* (PPF) atau *Production Possibility Boundary* (PPB). Gambar dari kurva PPC adalah sebagai berikut:



Sumber: Spence (2008), *Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Tinggi dan Inklusif*

Gambar 2.1
Production Possibility Curve

keterangan:

- a. Diasumsikan suatu perekonomian hanya memproduksi sepeda dan beras.
- b. Pada suatu saat negara ini dapat menentukan tingkat produksi dengan memilih kombinasi tertentu antara sepeda dan beras.
- c. Hanya pada titik-titik suatu PPC (misal PPC1) dapat dicapai suatu kombinasi antara sepeda dan beras yang optimal, misalnya pada titik y dan

- d. Sedangkan titik x_1 dan x_2 tingkat produksi (kombinasi antara sepeda dan beras) merupakan tingkat yang tidak optimal dan tidak efisien.
- e. Dalam dinamika perkembangannya suatu PPC dapat bergeser ke PPC yang lebih tinggi (PPC1 ke PPC2) misalnya karena ada teknologi baru atau ditemukannya sumber daya alam baru, sehingga kemungkinan peningkatan pertumbuhan tidak lagi dibatasi oleh misalnya titik y dan titik z pada PPC1 tetapi dapat lebih tinggi lagi yaitu pada setiap titik di PPC2.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2002) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Untuk menghitung PDRB yang dihasilkan suatu wilayah ada empat pendekatan yang digunakan, yaitu (BPS, 2002):

- a. Pendekatan produksi, yaitu pendekatan untuk mendapatkan nilai tambah di suatu wilayah dengan melihat seluruh produksi *netto* barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian selama satu tahun.
- b. Pendekatan pendapatan, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, meliputi:
 - 1) Upah/gaji (balas jasa faktor produksi tenaga kerja)

- 2) Sewa tanah (balas jasa faktor produksi tanah)
 - 3) Bunga modal (balas jasa faktor produksi modal)
 - 4) Keuntungan (balas jasa faktor produksi wiraswasta/skill)
- c. Pendekatan pengeluaran, yaitu model pendekatan dengan cara menjumlahkan nilai permintaan akhir dari seluruh barang dan jasa, yaitu:
- 1) Barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba) dan pemerintah.
 - 2) Barang dan jasa yang digunakan untuk membentuk modal tetap bruto
 - 3) Barang dan jasa yang digunakan sebagai stok dan ekspor netto
- d. Metode alokasi, model pendekatan ini digunakan karena kadang-kadang dengan data yang tersedia tidak memungkinkan untuk mengadakan perhitungan Pendapatan Regional dengan menggunakan metode langsung dengan tiga cara di atas, sehingga dipakai metode alokasi atau metode tidak langsung.

Sedangkan untuk cara penyajian PDRB dilakukan sebagai berikut:

- a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai PDRB.
- b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yaitu semua agregat pendapatan dinilai

... dan harga tetap maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun

ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi.

Dalam penelitian ini PDRB yang digunakan untuk penelitian pertumbuhan ekonomi di propinsi Nusa Tenggara Barat adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

4. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

Hingga saat ini tidak ada satu teori pun yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Inti dari teori-teori tersebut yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dari teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Arsyad, 2000).

Teori-teori yang berhubungan dengan pembangunan daerah antara lain:

a. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973) yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad, 2000). Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah

dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno, 2000).

Menurut Glasson (1990) dalam Saeroffi (2005), konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu:

- 1) Sektor-sektor basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Sektor-sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal.

Dengan kata lain, kegiatan atau aktivitas basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor barang dan jasa ke luar batas wilayah perekonomian, sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam wilayah perekonomian yang

bersangkutan. Aktivitas basis berperan sebagai penggerak utama

perekonomian suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain maka akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut (Ulya, 2007).

Secara implisit pembagian perekonomian regional yang dibagi menjadi dua sektor tersebut terdapat hubungan sebab akibat di mana keduanya kemudian menjadi pijakan dalam membentuk teori basis ekonomi. Bertambahnya kegiatan basis di suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan sehingga menambah permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, akibatnya akan menambah volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, semakin berkurangnya kegiatan basis akan menurunkan permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis yang berarti berkurangnya pendapatan yang masuk ke daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak utama.

b. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat di mana setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori tempat sentral memperlihatkan bagaimana pola-pola lahan dari industri yang berbeda-beda terpadu membentuk suatu sistem regional kota-kota (Supomo, 2000).

- 2) Memperkirakan pengaruh yang ada dan ditetapkannya lokasi pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya.

Interaksi antar kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain sebagai produsen dan konsumen serta barang-barang yang diperlukan menunjukkan adanya gerakan. Produsen suatu barang pada umumnya terletak pada tempat tertentu dalam ruang geografis, sedangkan para langganannya tersebar dengan berbagai jarak di sekitar produsen.

5. Kebijakan Optimal Prioritas Sektoral

Arsyad (2000), berpendapat bahwa masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber-sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah dengan mengembangkan basis ekonomi sektoral dan kesempatan kerja yang beragam. Untuk tujuan tersebut

diperlukan adanya kebijakan prioritas sektoral dalam menentukan sektor-sektor yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan.

6. Pengembangan Sektor Potensial

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mengadakan tinjauan keadaan, permasalahan dan potensi-potensi pembangunan. Berdasarkan potensi sumber daya alam yang kita miliki makanya adanya sektor potensial disuatu daerah harus dikembangkan dengan seoptimal mungkin. Arsyad (2000) dalam Saerofi (2005) mengatakan bahwa sampai dengan akhir dekade 1980-an di Indonesia terdapat tiga kelompok pemikiran dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memantapkan keberadaan sektor industri. Ketiga kelompok pemikiran tersebut adalah:

- a. Pengembangan sektor industri hendaknya diarahkan kepada sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Pemikiran seperti ini diwakili oleh kalangan ekonomi-akademis.
- b. Konsep Delapan Wahana Transformasi Teknologi dan Industri yang pada dasarnya memprioritaskan pembangunan industri-industri hulu secara serentak.
- c. Konsep keterkaitan antar industri, khususnya keterkaitan hulu-hilir

B. Kerangka Pemikiran

Dengan adanya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah menandakan suatu fenomena yang umum dijumpai, khususnya di negara berkembang. Namun hal ini, tidak harus dibiarkan terus berlangsung. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan antara lain adalah sumber daya alam, tenaga kerja, luas daerah, pasar ekspor, kebijakan pemerintah dan faktor-faktor lainnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dari laju pertumbuhan pendapatan daerah yang bersangkutan sehingga upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pertumbuhan pendapatan suatu daerah ditentukan dengan bagaimana daerah yang bersangkutan berperan sebagai eksportir bagi daerah lainnya. Menurut teori basis ekonomi kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi kegiatan basis dan non basis. Sektor basis merupakan sektor pasar dari dalam maupun dari luar, sedangkan sektor non basis merupakan sektor pasar dari dalam